

## CHAPTER 7

# Kategorisasi Isu dan Pencatutan Figur Narasumber Informasi Hoaks Covid-19

**Xenia Angelica Wijayanto**

Meskipun baru bulan Maret 2020 pemerintah RI baru mengumumkan secara resmi adanya pandemi Covid-19 di Indonesia, namun sesungguhnya Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia (Kominfo) sudah mulai mendata adanya hoaks Covid-19 sejak bulan Januari 2020. Hoaks Covid-19 tersebar di berbagai media, tercatat di media pemberitaan online (portal berita), maupun di media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, Youtube maupun Tik Tok.

Berdasarkan data survei yang dikutip dari Masyarakat Telematika (mastel.id) pada tahun 2017, dikatakan bahwa terdapat 92,40% kemunculan berita hoax berasal dari media sosial yang dilakukan oleh para oknum yang tidak bertanggung jawab. Dimana, penyebaran berita hoax tersebut disebar dalam bentuk tulisan sebesar 62,10% dan gambar sebesar 37,50%. Kedua bentuk penyebaran tersebut memiliki persentase cukup tinggi karena lebih mudahnya akses para oknum tak bertanggung jawab untuk

melakukan manipulasi data atau informasi untuk disebar ke khalayak publik.

Hoaks atau berita palsu yang sangat banyak tersebar di berbagai media tersebut menyebabkan kebingungan dan ketakutan dalam masyarakat. Berita palsu sering kali tersebar secara gratis dan masif, serta diakses oleh orang-orang yang malas melakukan pengecekan atau tidak mampu mengakses berita atau tidak memiliki akses ke media berita. Orang-orang seperti ini sangatlah rentan terhadap disinformasi dan misinformasi (Ireton & Posetti, 2018).

Makin banyaknya hoaks bisa menimbulkan pandemi informasi, atau yang disebut infodemik. World Health Organization (WHO) menyebutkannya adanya situasi epidemi informasi global yang salah/menyesatkan – menyebar dengan cepat melalui platform media sosial dan outlet lainnya – menimbulkan masalah serius bagi kesehatan masyarakat. “Kami tidak hanya memerangi epidemi; kami sedang melawan infodemik”, kata Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus pada Konferensi Keamanan Munich pada 15 Februari, 2019 (Zarocostas, 2020).

## **Disinformasi, Malinformasi, dan Misinformasi**

Secara khusus, UNESCO membagi kategori informasi yang tidak benar dalam beberapa kategori, yakni disinformasi, mal informasi, dan misinformasi. Ketiga hal ini perlu diwaspadai karena sering kali berada di masyarakat dan masyarakat tidak dapat membedakan satu dari lainnya. **Disinformasi** adalah informasi yang salah, dan orang yang menyebarkannya tahu bahwa itu salah namun secara sengaja dibuat untuk menyebabkan kekacauan. **Mal Informasi** merupakan peristiwa yang benar-benar terjadi, namun kejadiannya digunakan sedemikian rupa untuk menimbulkan kekacauan dan memanipulasi untuk merugikan seseorang, organisasi atau negara. **Misinformasi** adalah jenis informasi yang salah, namun yang menyebarkannya mempercayai bahwa informasi tersebut adalah benar sehingga tidak sengaja dibuat untuk menyebabkan kekacauan. (Ireton & Posetti, 2018)

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Kominfo pada 17 April 2022, tercatat sebanyak 5.829 hoaks seputar Covid-19 beredar di media sosial, dengan temuan isu mencapai 2.171 konten. Hoaks tersebut tersirkulasi melalui Facebook sebanyak 5.109 unggahan, Twitter sebanyak 577 unggahan, YouTube 55 unggahan, Instagram 52 unggahan, dan Tik Tok 36 unggahan (Aptika Kominfo, 2022).

Jumlah yang besar mengingat waktu persebarannya hanya sejak awal pandemi hingga saat ini. Dari sekian banyak hoaks yang beredar, portal berita Liputan6.com menuliskan bahwa Kominfo telah melakukan penanganan hoaks seputar Covid-19 untuk menghentikan penyebarannya. "Sebanyak 5.599 hoaks seputar Covid-19 telah ditindaklanjuti dan 767 konten telah diserahkan ke penegak hukum." (Wicaksono, 2022).

Data penanganan sebaran isu hoaks Covid-19 periode Januari 2020-April 2022, yang sudah dilakukan oleh Kominfo bisa dilihat pada tabel berikut ini:



Gambar 1. Penanganan Sebaran Isu Hoaks Covid-19

## Laporan Hoaks Kementerian Kominfo

Berkaitan dengan penanganan hoaks ini maka Kementerian Kominfo secara rutin mengeluarkan laporannya rutin setiap bulan secara berkala melalui laman resmi mereka yang dapat diakses di [https://www.kominfo.go.id/content/all/laporan\\_isu\\_hoaks](https://www.kominfo.go.id/content/all/laporan_isu_hoaks).

Kegiatan pelaporan dan verifikasi atas beragam hoaks yang beredar di masyarakat, yang dilakukan oleh Kementerian Kominfo ini merupakan upaya pemerintah untuk melawan hoaks yang sangat masif di Indonesia (Nurlatifah, 2019; Firmansyah & Azhar, 2022).

Isi laporan tersebut kemudian diberikan penjelasan oleh Kementerian Kominfo berupa klasifikasi jenis informasi hoaks apa saja. Secara umum Kominfo akan membaginya dalam klasifikasi disinformasi, hoaks, dan misinformasi. Hal ini juga disertai informasi sumber media, tanggal, bulan, dan tahun informasi itu diterima, serta sedikit penjelasan atas informasi tersebut, seperti tangkapan di layar sebagai berikut:



Gambar 2. Tangkapan layar laporan isu hoaks Kementerian Kominfo

Meski laporan di atas dikeluarkan oleh kominfo setiap bulannya, namun sayangnya tidak ada analisis mendalam termasuk dari sisi kategori jenis hoak, maupun dari sisi pihak yang digunakan namanya untuk membangun informasi yang tidak benar tersebut. Sehingga kemudian banyak peneliti mencoba menganalisisnya secara terpisah untuk mengetahui lebih mendalam dari setiap kategori isunya. Tentu saja yang paling sering dibahas adalah isu hoaks politik (Sanjaya, 2020; Sosiawan dan Wibowo, 2020).

Penelitian kali ini mengkaji data yang telah dikumpulkan sebelumnya oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, yakni Laporan Isu Hoaks dengan mengerucutkan waktu berita dalam kurun waktu tanggal 1 Januari 2022 – 30 April 2022 (4 bulan). Dari laporan

tersebut, terdapat 127 data yang kemudian dikelompokkan dan digolongkan menjadi beberapa kategori tema. Pengelompokan berkaitan dengan isu Covid, dan menyisihkan isu-isu non Covid sehingga nantinya didapatkan temuan lanjutan, secara lebih khusus pada hoak isu Covid dari data yang sudah dikumpulkan oleh pihak Kementerian Kominfo.

## **Kategori informasi Hoaks Covid-19**

Untuk memudahkan analisis, maka penulis mengambil sampel data informasi/berita hoaks yang sudah dikumpulkan oleh Kementerian Kominfo selama kurun waktu 1 Januari 2022 – 30 April 2022. Dari data yang ada, yakni sebanyak 127 kasus hoaks yang terdeteksi dan dilaporkan ke Kominfo, maka pada empat bulan tersebut paling sering mengambil tema tentang : Vaksinasi & Vaksin sebanyak 60 kali, Obat Covid sebanyak 9 kali, Test Covid 9 kali, varian Covid sebanyak 8 kali, kemudian Politik, juga Endemi dan Pandemi sebanyak 6 kali.

Banyaknya tema vaksin Covid-19 sesuai dengan situasi pada bulan-bulan yang diteliti, yakni pada masa kegiatan vaksinasi dan pelaksanaan vaksin sedang digiatkan oleh pemerintah. Pemerintah Indonesia memulai pelaksanaan program vaksinasi dosis lanjutan atau booster pada tanggal 12 Januari 2022. Sementara itu, pada bulan April 2022, pemerintah Indonesia memutuskan untuk tidak lagi menerima donasi atau hibah vaksin virus corona (Covid-19) baik dari skema bilateral maupun multilateral. Keputusan itu juga mempertimbangkan masa kedaluwarsa vaksin donasi yang singkat hanya sekitar 3 bulan (CNNIndonesia, 2022).

Untuk Selengkapnya bisa dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.** Kategori informasi Hoaks Covid-19

<b>NO</b>	<b>TEMA</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>NO</b>	<b>TEMA</b>	<b>JUMLAH</b>
1	Vaksinasi & Vaksin	60	11	Agama	2
2	Obat Covid	9	12	PPKM	2
3	Tes Covid	9	13	APD	1
4	Varian Covid	8	14	Bansos	1
5	Politik	6	15	Deteksi Covid	1
6	Endemi & Pandemi		16	Haji	1
7	Lowongan kerja	5	17	Ledakan Kasus Covid	1
8	Penyebab Covid	5	18	Pemaksaan	1
9	Efek Covid	3	19	Perjalanan Luar Negeri	1
10	Mudik	3	20	Racun	1

Sumber: olahan data dari Kominfo Januari-April 2022

## **Pihak Yang Digunakan Namanya Untuk Isu Hoaks Covid-19**

Sikap pembuat berita palsu dan hoaks tampak jelas berusaha membuat informasi yang disebarluaskan dengan “mencatut” alias menggunakan nama dan pihak tertentu yang seolah-olah memberikan pernyataan maupun mendukung dan membenarkan informasi palsu tersebut.

Penggunaan nama ahli/pakar, tokoh, pemerintah dan sebagainya menunjukkan upaya pembuat informasi untuk meyakinkan audiensinya. Bagaimanapun juga, kepakaran menjadi hal yang paling mudah menjadi bukti bagi pembenaran (justifikasi) dan penilaian atas sebuah informasi dan berita). Salah satu penelitian terdahulu menunjukkan bagaimana figure penting, baik tokoh, maupun pakar

digunakan nama dan kepakarannya untuk digunakan dalam sebuah informasi yang bersifat hoak (Utami, 2018).

Apabila dilihat dari tabel berikut ini, maka tampak bahwa mengatasnamakan masyarakat sipil, masyarakat umum masih menjadi narasumber terbesar yang digunakan oleh pembuat hoaks, sebanyak 36 dari 127 total narasumber dari info hoaks tersebut. Peringkat kedua adalah Dinas Kesehatan (Dinkes) daerah sebanyak 12 kali pengutipan.

**Tabel 2.** Figur terkait

<b>NO</b>	<b>FIGUR TERKAIT</b>	<b>JUMLAH</b>
1	Masyarakat Sipil	36
2	DinKes daerah	12
3	Pakar/Ahli Luar Negeri	9
4	Menteri-menteri	8
5	Pemerintah Luar Negeri	8
6	Presiden Joko Widodo	8
7	Negara asing	7
8	Public Figure luar negeri	6
9	WHO	6
10	Kementerian Kesehatan RI	5
11	Agence France-Presse (AFP)	2
12	Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana	2
13	Pakar/Ahli	2
14	Asosiasi	1
15	BPJS Kesehatan	1
16	Dokter Indonesia	1
17	Facebook	1
18	Guru	1
19	Kementerian Sosial RI	1
20	Media Massa	1
21	MUI	1
22	Pemerintah Daerah	1
23	Mahkamah Agung Republik Indonesia	1

24	Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional	1
25	RSUD Cipayung, Jakarta Timur	1
26	TNI	1
27	Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)	1

Sumber: olahan data dari Kominfo Januari-April 2022

Setelah menganalisis berbagai data mentah yang dimiliki oleh Kominfo selama periode Januari-April 2022 didapatkan kesimpulan bahwa hoaks Covid-19 memiliki beragam kategori hingga kurang lebih 20 kategori yakni: Vaksinasi & Vaksin, Obat Covid, Tes Covid, Varian Covid, politik, endemi & pandemi, lowongan kerja, penyebab covid, efek covid, mudik, agama, PPKM, APD, bansos, deteksi covid, haji, ledakan kasus covid, pemaksaan, pengerjaan luar negeri, racun. Sementara itu untuk bagian penggunaan figur yang dijadikan tokoh/narasumber hoaks, terdapat 27 pihak yakni: masyarakat sipil, dinkes daerah, pakar/ahli luar negeri, menteri-menteri, Pemerintah luar negeri, Presiden Joko Widodo, negara asing, public figure luar negeri, WHO, Kementerian Kesehatan RI, Agence France-Presse (AFP), Kepala BNPB, pakar/ahli, asosiasi, BPJS Kesehatan, dokter Indonesia, Facebook, guru, Kementerian Sosial RI, media masa, MUI, Pemerintah Daerah, Mahkamah Agung RI, Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, RSUD Cipayung-Jakarta Timur, TNI, Badan Siber dan Sandi Negara.

Beragamnya kategori serta penggunaan tokoh/figur ini menunjukkan betapa produsen hoaks sangat serius dalam upayanya memproduksi informasi yang bersifat menyesatkan dengan sasaran masyarakat Indonesia yang begitu luas. Upaya penanganan hoaks ini pun tidak bisa semata-mata mengandalkan Pemerintah Indonesia, khususnya pihak Kominfo. Melainkan harus ada upaya dari segala lapisan masyarakat untuk bersama-sama memerangi hoaks isu covid-19 secara terus menerus.



## Daftar Pustaka

- CNN Indonesia. (2022) Pemerintah putuskan setop hibah vaksin covid mulai April 2022.  
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220330121320-20-777890/pemerintah-putuskan-setop-hibah-vaksin-covid-mulai-april-2022>
- Firmansyah, H., & Azhar, A. A. (2022). Framing Analysis of the Contents of Covid-19 Hoax News on the Kominfo. go. id Website. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 5(2).
- Nurlatifah, Mufti. "The Fight Against Hoax: An Explorative Study towards Anti-Hoax Movements in Indonesia." *Jurnal Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia* 4, no. 1 (2019): 46-54.
- Ireton, C., & Posetti, J. (2018). *Journalism, fake news & disinformation: handbook for journalism education and training*. Unesco Publishing.
- Sanjaya, M. (2020). Information Hoax in Political Years 2019: Learning and Challenges. *KnE Social Sciences*, 424-438.
- Sosiawan, E. A., & Wibowo, R. (2020). Kontestasi berita hoax pemilu Presiden tahun 2019 di media daring dan media sosial. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 17(2), 133-142.
- Utami, P. (2018). Hoax in modern politics: the meaning of hoax in Indonesian politics and democracy. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 22(2), 85-97.  
<https://aptika.kominfo.go.id/2022/04/5-829-hoaks-seputar-covid-19-beredar-di-media-sosial-simak-rinciannya/>
- Wicaksono, E. P. (2022). 5.829 Hoaks Seputar Covid-19 Beredar di Medsos, Simak Rinciannya. <https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4941770/5829-hoaks-seputar-covid-19-beredar-di-medsos-simak-rinciannya>
- Zarocostas, John. "How to fight an infodemic." *The lancet* 395, no. 10225 (2020): 676.